

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah ASEAN

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ibu kota Negara Thailand oleh lima negara anggota, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura. Latar belakang didirikannya ASEAN karna adanya beberapa kesamaan yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, persamaan-persamaan tersebut yaitu letak geografis, budaya, nasib yang pernah dijajah negara asing (kecuali Thailand), dan persamaan kepentingan di berbagai bidang. Wilayah Asia Tenggara yang tereletak di kawasan khatulistiwa yang memiliki curah hujan dan panas yang cukup, sehingga wilayah ini dianugrahi akan sumber daya alamnya yang melimpah baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di wiliayah atau negara tersebut. Selain itu, alasan yang lain ASEAN didirikan karena adanya keinginan yang kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena pada era 1960-an situasi pada saat itu sedang dihadadpkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besarndan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan yang dapat menghambat pembangunan. Terbentuknya AEAN ditandai dengan

ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh masing-masing menteri luar negeri yaitu Narciso Ramos (Filipina), Adam Malik (Indonesia), Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan S. Rajaratman (Singapura). Deklarasi Bangkok itu sendiri berisikan tujuan dibentuknya ASEAN sebagai berikut (Sekretariat ASEAN Indonesia, 2019):

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkuat landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, ilmu pengetahuan, teknik, dan administrasi.
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan penggunaan pertanian dan industri, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup.
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.

7. Memelihara kerjasama yang lebih erat dan bergabung dengan berbagai organisasi internasional maupun regional lainnya untuk menjajaki segala kemungkinan saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.

Adapun prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional setiap negara anggota ASEAN.
2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
3. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kedaulatan atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional.
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN, menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial.

Pada awalnya jumlah anggota ASEAN terdiri dari lima negara, namun kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, disusul dengan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Dengan demikian jumlah anggota ASEAN menjadi sepuluh negara. Lambang ASEAN yaitu seikat batang padi yang berjumlah sepuluh batang sesuai dengan jumlah anggota yang menggambarkan solidaritas dan kesepakatan ASEAN serta melambangkan adanya ikatan kerjasama untuk menciptakan kemakmuran rakyat masing-masing negara ASEAN.



Sumber: *Republika*, 2019

Gambar 4.1

Peta Negara-Negara Anggota ASEAN

Sebagian besar negara anggota ASEAN masih digolongkan negara berkembang dan hanya Singapura yang termasuk ke dalam golongan negara maju. Perekonomian Kawasan Asia Tenggara masih tergantung pada hasil alam, kecuali negara Singapura. Oleh sebab itu, adanya pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara oleh negara anggota ASEAN yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

B. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau yang biasa disebut *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dengan menciptakan pasar regional di kawasan ASEAN. AFTA dibentuk pada saat pertemuan tingkat kepala negara (ASEAN Summit) ke-4 di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya

AFTA untuk meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN dan pemberdayaan bersama seluruh sumber daya dari dan oleh negara anggota ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia dengan penghapusan bea dan halangan non-bea di dalam kawasan ASEAN, dan menarik investasi asing langsung ke ASEAN. AFTA dibentuk untuk menjadi langkah awal dalam rangka mendukung proses terciptanya integrasi ekonomi ASEAN yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam kesepakatan tersebut, AFTA direncanakan akan beroperasi penuh pada tahun 2008. AFTA memiliki mekanisme utama yang mencakup empat program, yaitu:

1. Pengurangan tingkat tarif perdagangan untuk sejumlah produk bagi negara anggota ASEAN hingga mencapai 0-5 persen.
2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan non-tarif.
3. Mendorong kerjasama guna pengembangan fasilitas perdagangan terutama pada bidang bea masuk, standar, dan kualitas.
4. Kandungan lokal diberikan penetapan sebesar 40 persen.

AFTA diluncurkan dengan instrumen CEPT (Common Preferential Rate Preferential) yang dikenalkan pada tahun 1993, pada saat itu pula dimulailah program penurunan tarif bagi setiap negara anggota melalui penyampaian *Legal Enactment* yang dikeluarkan setiap 1 Januari. Sidang Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 1994, memutuskan untuk mempercepat implementasi penuh dari AFTA menjadi tahun 2003. Salah satu yang termasuk dalam implementasi AFTA sendiri yaitu produk hasil pertanian.

Sedangkan pada tahun 1998, KTT-ASEAN di Hanoi menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat implementasi penuh AFTA menjadi tahun 2002 dengan fleksibilitas, artinya suatu keadaan yang mana diraskan masih belum sepenuhnya siap untuk menurunkan beberapa produk menjadi 0-5 persen pada tahun 2002, maka dapat ditunda pelaksanaannya sampai dengan tahun 2003.

Perjanjian administratif dalam sejarah pembentukan AFTA diatur oleh peraturan perdagangan masing-masing negara anggota ASEAN. Otoritas sekretariat ASEAN hanyalah sebatas memantau dan memastikan bahwa negara-negara anggota patuh dalam pelaksanaan AFTA. Hal ini mengartikan bahwa sekretariat ASEN tidak memiliki otoritas hukum untuk mengambil tindakan terhadap negara yang tidak konsisten pada eksekusi AFTA. Perkembangan terakhir dari AFTA adalah perjanjian untuk menghapuskan semua tarif impor barang dan berlaku untuk negara Brunei Darussalam pada tahun 2010 dan untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar pada tahun 2015.

C. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) adalah bentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Pembentukan MEA telah direncanakan saat KTT di Malaysia tahun 1997, gagasan pembentukan MEA didasari karena adanya keinginan terwujudnya kawasan yang memiliki kemakmuran, kestabilan politik, dan persaingan pertumbuhan ekonomi. Gagasan ini menguat pada saat KTT diadakan di Bali

pada tahun 2003 dan menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan MEA pada tahun 2020, tetapi karena adanya perubahan gelombang ekonomi yang tak menentu di Eropa dan Amerika menjadi pemicu terhadap perubahan pelaksanaan MEA yang kemudian pelaksanaannya dipercepat pada tahun 2015.

MEA telah merencanakan peta ekonomi guna perluasan ekonomi dengan dibukanya pasar perdagangan bebas antar negara ASEAN. Dengan adanya perdagangan bebas, maka dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang menjadi penghalang kegiatan ekspor impor. Hadirnya MEA untuk mewujudkan pertumbuhan yang seutuhnya dan tidak hanya didasari atas kepentingan ekonomi semata, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi kemungkinan perubahan yang terjadi pada aspek sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pada bulan Agustus tahun 2006, pertemuan ke-38 ASEAN *Economic Minister Meeting* (AEM) di Kuala Lumpur menghasilkan kesepakatan empat pilar yang termuat dalam dokumen *Blueprint*. Isi dari keempat pilar tersebut adalah membuat pasar dan basis produksi tunggal, menjadikan kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, menjadikan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan menjadikan kawasan integritas ekonomi global. Kemudian pada tahun 2015, negara anggota ASEAN menyetujui *Blueprint* MEA. MEA 2015 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASEAN dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, memiliki pembangunan yang setara, dan mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dengan kawasan di

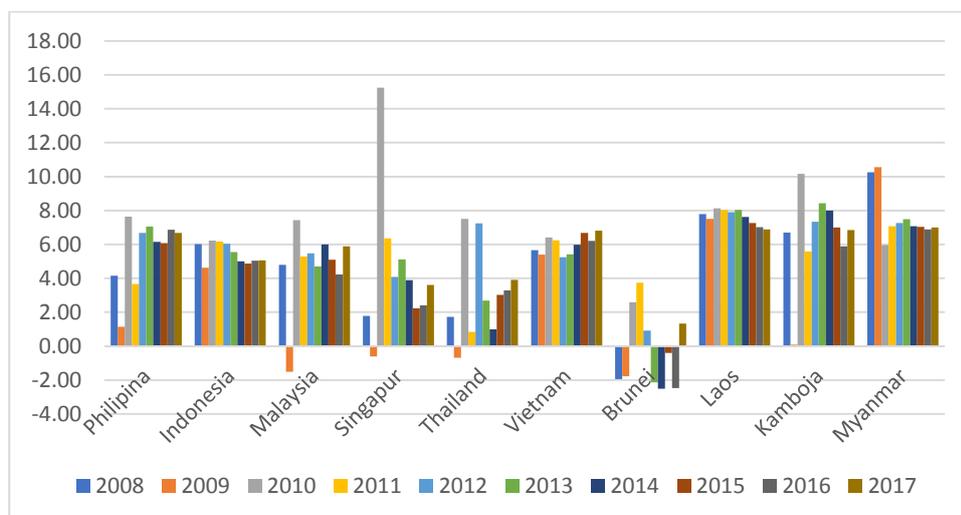
luar ASEAN. Pada 32 Desember 2017, implementasi MEA tercatat 72 dari 118 prioritas telah berhasil diimplementasikan. MEA 2025 yang menjadi kelanjutan MEA 2015, memiliki tujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegritas dan kohesif, dinamis dan berdaya saing, peningkatan konektivitas serta kerjasama sektoral, inklusif, terpusat kepada masyarakat, serta ASEAN yang mengglobal.

Ekonomi ASEAN memiliki cakupan kerjasama yaitu sebagai kerjasama ekonomi pada bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Tak hanya itu, kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, dan usaha mikro kecil menengah (KEMLU, 2019).

D. Perkembangan Setiap Variabel dalam Penelitian

1. Perkembangan PDB Negara Anggota ASEAN

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu periode tertentu yaitu dengan PDB (Produk Domestik Bruto), PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan.



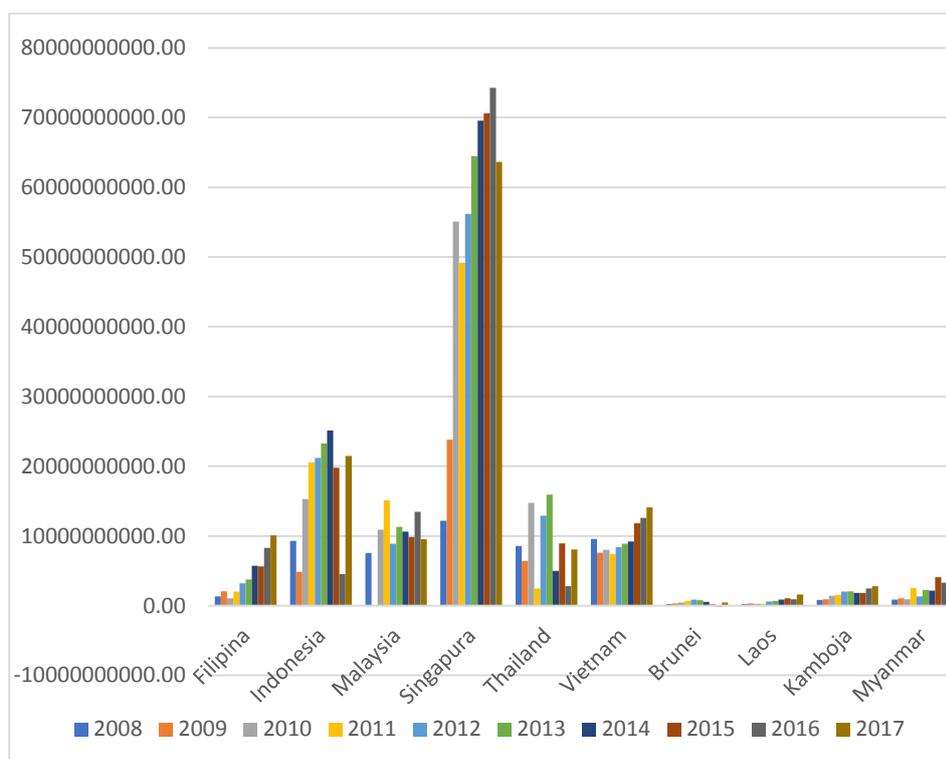
Sumber: *ASEANstats*, diolah 2019

Gambar 4.2
Perkembangan PDB Negara Anggota ASEAN Tahun
2014-2017 (dalam persen)

Dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan PDB setiap negara mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. adanya trend penurunan pada pertumbuhan PDB di tahun 2008 ke 2009, hal ini disebabkan karena adanya krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dikenal dengan krisis *subprime mortgage* atau krisis kredit macet di Amerika Serikat yang berimbas pada negara-negara berkembang termasuk negara berkembang yang ada di ASEAN. Kemudian, sebagian besar negara di ASEAN terjadi peningkatan pada tahun 2009 ke 2010 namun terjadi penurunan pada tahun 2010 ke 2011. Selama tahun 2008-2017 pertumbuhan PDB terkecil terjadi pada Negara Brunei Darussalam sedangkan untuk pertumbuhan PDB yang cukup stabil diantara negara lainnya adalah Negara Vietnam.

2. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Negara Anggota ASEAN

Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. PMA menjadi salah satu sumber daya modal yang dapat menambah kapasitas produksi yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan PDB pada masa yang akan datang.



Sumber: *World Bank*, diolah 2019

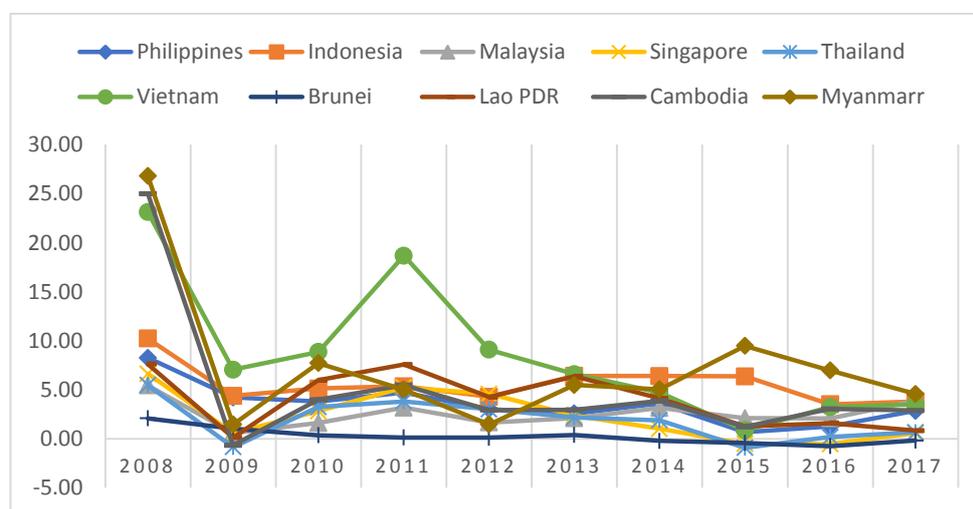
Gambar 4.3
Perkembangan FDI pada Negara-Negara Anggota
ASEAN Periode 2008-2017 (US\$)

Perkembangan PMA pada setiap negara anggota ASEAN selama periode penelitian terlihat pada gambar di atas adanya trend kenaikan dan

penurunan pada PMA di ASEAN. Negara Singapore menjadi negara yang memiliki yang memiliki tingkat penerimaan investasi tertinggi di ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa negara Singapore menjadi negara yang banyak diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya. Sedangkan Brunei Darussalam dan Lao PDR menjadi negara dengan sedikit masuknya aliran investasi asing dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya.

3. Perkembangan Inflasi Negara Anggota ASEAN

Inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum pada suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang masuk kategori berat atau sedang dapat memberikan efek penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.



Sumber: *World Bank*, diolah 2019

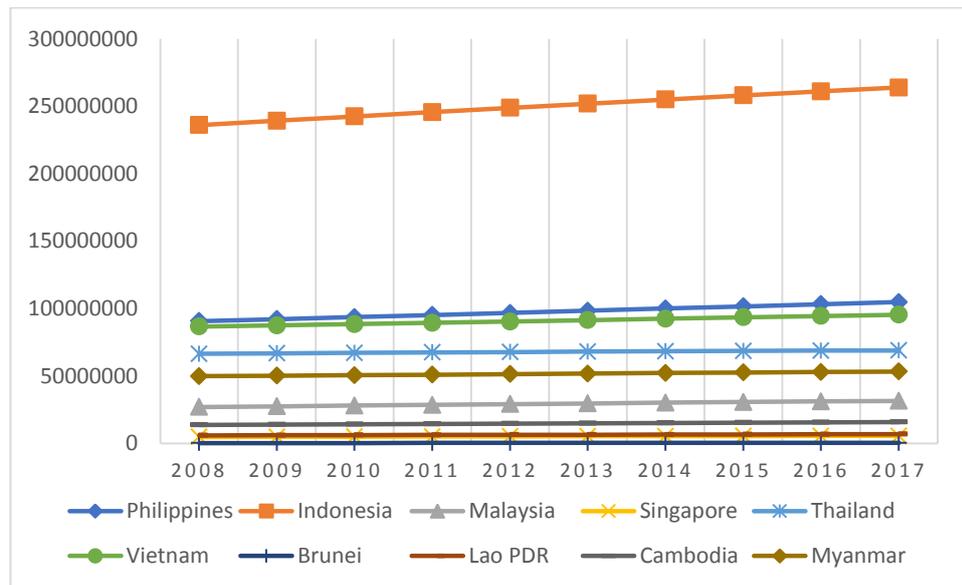
Gambar 4.4
Perkembangan Laju Inflasi pada Negara-Negara Anggota
ASEAN Periode 2008-2017 (persen)

Pada gambar di atas terlihat laju inflasi pada setiap negara berjalan fluktuatif. Pada tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan inflasi pada rata-rata negara ASEAN yang disebabkan karena adanya krisis ekonomi global yang melanda pada tahun 2008. Kemudian banyak negara yang mampu melewati krisis tersebut dan memulihkan kembali perekonomian negara pada tahun 2009 sehingga laju inflasi dapat ditekan dan terjadi trend penurunan seperti terlihat pada gambar 4.4.

Inflasi dapat disebabkan oleh pengaruh dari luar negeri seperti yang terjadi pada tahun 2008 akibat adanya krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat dan juga pengaruh dari dalam negeri. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas laju inflasi dengan cara memberlakukan kebijakan yang tepat. Seperti yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2013 dengan capaian laju inflasi yang cukup stabil.

4. Perkembangan Populasi Negara Anggota ASEAN

Populasi atau penduduk menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara. Penempatan manusia sebagai subjek pembangunan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah penduduk yang cukup besar pada suatu negara dapat memberikan keuntungan karena menyediakan banyak tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar tidak selalu memberikan dampak positif bagi perekonomian karena ada pula dampak negative yang bisa ditimbulkan. Dampak negatif yang bisa timbul seperti kepadatan penduduk, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tidak meratanya persebaran penduduk.



Sumber: *World Bank*, data diolah 2019

Gambar 4.5
Perkembangan Populasi pada Negara-Negara Anggota ASEAN
Periode 2008-2017 (jiwa)

Berdasarkan gambar di atas bahwa jumlah penduduk di negara anggota ASEAN menunjukkan trend kenaikan yang cukup kecil dan stabil. pertumbuhan penduduk yang rendah mengindikasikan bahwa program pengendalian pertumbuhan penduduk sukses. pertumbuhan penduduk yang rendah memiliki keuntungan yaitu menurunkan tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) pada penduduk usia produktif serta mempermudah pemerintah dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat.